

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Program Evaluasi Meta

1. Pengertian Evaluasi Meta

Evaluasi mempunyai arti yang berbeda untuk guru yang berbeda. Evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi dimana suatu tujuan telah dicapai.¹ Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran. Menurut Edwind Wand dan Gerald W. Brown Dalam buku *Essentials of Educational Evaluation* sebagaimana dikutip oleh Masrukin, dikatakan bahwa: *Evaluation refer to the act or process to determining the value of something*, yaitu evaluasi merupakan suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan hasil dari pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.²

Menurut Suchman dalam bukunya yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain dikemukakan oleh Worthen dan Sandres sebagaimana dikutip oleh Suharsimi, dua ahli tersebut mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.³

¹ Sulistyorini, *Evaluasi Pendidikan*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 45.

² Masrukin, *Evaluasi Pendidikan*, STAIN, Kudus, 2008, hlm. 1.

³ Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 1.

Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (*the worth and merit*) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggung jawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Menurut rumusan tersebut, inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.⁴

Evaluasi merupakan bagian dari kegiatan kehidupan manusia sehari-hari. Disadari atau tidak, orang sering melakukan evaluasi, baik terhadap dirinya sendiri, terhadap lingkungan sosialnya atau lingkungan fisiknya.⁵ Dewasa ini manfaat evaluasi semakin berkembang karena semakin banyak dipelajari dan didalami oleh para ahli evaluasi yang bukan saja ahli pendidikan, tetapi juga para konsultan dan profesional, di berbagai bidang ilmu yang bervariasi.⁶

Program sendiri diartikan sebagai rencana. Program adalah kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Sedangkan evaluasi program adalah suatu rangkaian yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan.⁷

Makna dari evaluasi program sendiri mengalami pemantapan. Menurut *Ralph Tyler* yang dikutip oleh Suharsimi dan Cepi Safruddin mengatakan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah dapat terealisasi. Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh dua orang ahli evaluasi, yaitu Cronbach dan Stufflebeam yang dikutip oleh Suharsimi dan

⁴ Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

⁵ Slameto, *Evaluasi Pendidikan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 4.

⁶ Sukardi, *Evaluasi program Pendidikan dan Pelatihan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 2.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 295.

Cepi Safruddin mengemukakan bahwa evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.⁸

2. Manfaat Evaluasi Program

Dalam organisasi pendidikan, evaluasi program dapat disamaartikan dengan kegiatan supervisi. Secara singkat, supervise diartikan sebagai upaya mengadakan peninjauan untuk memberikan pembinaan, maka evaluasi program adalah langkah awal dalam supervise, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula. Evaluasi program pendidikan tidak lain adalah supervisi pendidikan dalam pengertian khusus, tertuju pada lembaga secara keseluruhan.⁹

3. Tujuan Evaluasi Program

Evaluasi program dilakukan dengan suatu maksud atau tujuan yang berguna dan jelas sasarannya. Ada empat kegunaan utama evaluasi program, yaitu:

1) Mengkomunikasikan Program Kepada Publik

Mengkomunikasikan hasil evaluasi program yang lengkap akan memiliki keuntungan bagi guru dan sekolah. Oleh karena itu sekolah memiliki kewajiban untuk mengkomunikasikan efektivitas program pembelajarannya kepada orang tua maupun publik lainnya melalui hasil-hasil evaluasi yang dilaksanakan, dengan demikian publik dapat menilai tentang efektivitas program pembelajaran dan memberikan dukungan yang diperlukan.

2) Menyediakan Informasi Bagi Pembuat Keputusan

Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar bagi pembuat keputusan, sehingga keputusan tersebut valid dibanding keputusan yang hanya

⁸ Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 5.

⁹ *Ibid.*, hlm. 21.

berdasarkan intuisi saja. Pembuat keputusan biasanya memerlukan informasi yang akurat agar dapat memutuskan sesuatu secara tepat.

3) Penyempurnaan Program yang Ada

Evaluasi program yang dilaksanakan dengan baik dapat membantu upaya-upaya dalam rangka menyempurnakan jalannya program sehingga lebih efektif.

4) Meningkatkan Partisipasi

Evaluasi merupakan upaya meningkatkan motivasi guru untuk meningkatkan kinerjanya. Bagi siswa informasi hasil evaluasi yang berupa kemajuan hasil belajar siswa juga mempunyai manfaat untuk meningkatkan motivasi belajarnya.¹⁰

4. Evaluator Program

Ada dua kemungkinan asal (dari mana) orang yang dapat menjadi evaluator program ditinjau dari program yang akan dievaluasi, yaitu evaluator dalam (*internal evaluation*) dan evaluator luar (*external Evaluation*). Evaluator dalam adalah petugas evaluasi program yang sekaligus merupakan salah seorang dari petugas atau anggota pelaksana evaluasi. Sedangkan evaluator luar adalah orang-orang yang tidak terkait dengan kebijakan dan implementasi program.

Sedangkan pengertian evaluasi meta sendiri yaitu, sama juga seperti mengevaluasi proyek atau program, evaluasi juga dapat dievaluasi yang disebut *evaluasi meta*. Evaluasi meta dapat dilakukan bersama kegiatan evaluasi yang biasa atau rutin untuk perbaikan sehingga evaluasi akan bertambah baik. Dapat dilakukan ketika sedang mengevaluasi atau sesudah evaluasi selesai, dilakukan untuk mengetahui apa yang telah dilakukan.

Evaluasi meta dilakukan berdasarkan pengetahuan bahwa evaluasi merupakan pelajaran, pengalaman, bagi mereka yang terlibat, sehingga evaluasi dapat dikembangkan selagi dalam proses dan evaluasi berikutnya dapat lebih

¹⁰ Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 11.

berhasil. Evaluasi meta dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Evaluasi meta eksternal yaitu evaluasi yang dilakukan konsultan dari luar program, dapat dipakai untuk melihat kebenaran dan menilai desain evaluasi, melihat keprogresan program, serta untuk dapat meyakinkan dan lebih dapat dipercaya. Laporan evaluasi internal, misalnya apabila disertai dengan laporan evaluasi meta eksternal akan menjadi lebih terpercaya.

Prosedur meta evaluasi internal tidak terlalu formal, dapat dipakai untuk merevisi suatu evaluasi dan juga dapat menolong kita untuk terus dapat mengikuti kegiatan proses evaluasi (*keep track*). Usaha evaluasi meta juga dapat membuat kita terus terlibat dan bertanggung jawab, dan akan menambah kepercayaan atas evaluasi.¹¹

a. Subjek Evaluasi Meta

Tuntutan untuk seorang evaluator tinggi, tetapi tuntutan terhadap seorang evaluator meta lebih tinggi lagi. Seorang evaluator bukan saja harus kompeten dalam melakukan evaluasi yang pokok, ia juga harus dapat mengetahui bahwa evaluasi itu jelek atau baik dan meyakinkan kepada orang lain akan hasil evaluasinya.

Menurut Worthen, Blain R & James R. Sanders sebagaimana yang dikutip oleh Farida Yusuf, orang-orang yang patut melakukan evaluasi meta yaitu:

- 1) Evaluasi meta dilakukan oleh evaluator sendiri (*original evaluator*). Evaluator memang tidak dapat dikatakan bebas terhadap personel bias, dan sebaiknya atau disarankan untuk meminta evaluator lain melihat pekerjaan kita, walaupun hanya kritik dari teman sejawat. Disamping itu, akan lebih baik juga bagi evaluator untuk mengukur pekerjaannya dari kriteria evaluasi meta, dari pada tanpa dievaluasi sama sekali.
- 2) Evaluasi meta dilakukan oleh pemakai evaluasi.

¹¹ Farida Yusuf Tayibnapis, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 175.

3) Evaluasi meta dilakukan oleh evaluator ahli (dilakukan oleh evaluator eksternal).¹²

b. Standar yang Dipakai untuk Evaluasi Meta

Ada beberapa kriteria dan standar yang telah ada untuk menilai evaluasi, yaitu *Standard for Evaluations of Educational Programs, and Materials* yang dibuat oleh *The Joint Commette on Standard for Educational Evaluation*. Standar ini digolongkan atas empat domain yaitu:

- 1) *Utility standard* : dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa evaluasi akan memberikan informasi yang praktis yang diperlukan oleh audiensi.
- 2) *Feasibility standards* : dimaksudkan bahwa evaluasi akan realistik, bijaksana, diplomatik, dan cermat.
- 3) *Propierty standards* : untuk meyakinkan bahwa evaluasi akan dilakukan dengan legal dan etik demi kepentingan dan keamanan mereka yang terlibat, dan juga bagi mereka yang akan dipengaruhi oleh hasilnya.
- 4) *Accuracy standards* : standar akurasi ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa evaluasi akan menyajikan informasi yang secara teknik kuat tentang objek yang dievaluasi dan tentang kegunaan atau manfaatnya.¹³

c. Langkah-langkah untuk Melakukan Evaluasi Meta

Desain evaluasi yang dikemukakan oleh Worthen, Blain R & James R. Sanders dalam bukunya yang dikutip oleh Farida Yusuf adalah sebagai berikut:

- 1) Siapkan satu salinan desain yang siap untuk direview . Evaluasi meta formatif disarankan sesegera mungkin setelah desain selesai dirumuskan supaya review produktif.
- 2) Tentukan siapa yang akan melakukan evaluasi meta.
- 3) Pastikan ada hak untuk melakukan evaluasi meta.
- 4) Gunakan standar atau kriteria meta evaluasi untuk melakukan evaluasi meta.

¹² *Ibid.*, hlm. 178.

¹³ *Ibid.*, hlm. 178.

- 5)Gunakan kriteria atau standar evaluasi pada desain yang ada. Beberapa kriteria evaluasi meta melampirkan alat bantu untuk mengaplikasikan kriteria yang diberikannya. Misalnya, dengan ceklis yang dilampirkan pada setiap publikasinya. Apabila tidak, disarankan untuk membuat ceklis sendiri.
- 6)Periksa kecermatan desain evaluasi (*adequacy*). Tidak ada satu desain pun yang sempurna. Oleh sebab itu, perlu dilihat kembali apakah desain perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi program.¹⁴

Dari beberapa penjelasan diatas, setelah dilakukan evaluasi meta, ada empat kebijaksanaan lanjutan yang mungkin diambil setelah evaluasi dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- 1)Kegiatan tersebut dilanjutkan karena dari data yang terkumpul diketahui bahwa program ini sangat bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan lancer tanpa hambatan sehingga kualitas pencapaian tujuannya tinggi.
- 2)Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penyempurnaan karena dari data yang terkumpul diketahui hasil program sangat bermanfaat tetapi pelaksanaannya kurang lancer atau kualitas pencapaian tujuan kurang tinggi. Yang perlu untuk kebijaksanaan berikutnya adalah cara atau proses kegiatan pencapaian tujuan.
- 3)Kegiatan tersebut dimodifikasi karena dari data yang terkumpul dapat diketahui bahwa kemanfaatan hasil program kurang tinggi sehingga perlu disusun lagi perencanaan secara lebih baik. Dalam hal ini mungkin tujuannya yang perlu diubah.
- 4)Kegiatan tersebut tidak dapat dilanjutkan (dengan kata lain dihentikan) karena data yang terkumpul diketahui bahwa hasil program kurang bermanfaat, ditambah lagi di dalam pelaksanaan sangat banyak hambatannya.¹⁵

Di dalam Al-Qur'an, sistem evaluasi yang diterapkan oleh Allah tidak menggunakan sistem laboratorial seperti dalam dunia ilmu pengetahuan modern

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 186.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 292.

sekarang. Namun prinsip-prinsipnya menunjukkan bahwa sistem pengukuran terhadap perilaku manusia yang beriman dan tak beriman secara umum telah pula ditunjukkan dalam Al Qur'an. Untuk mengetahui sejauh mana kuatnya iman seseorang, Allah SWT terkadang mengevaluasinya melalui berbagai cobaan yang besar. Allah SWT berfirman :

أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۖ وَلَقَدْ
فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
الْكَاذِبِينَ ۖ

Artinya: Apakah manusia itu mengira, bahwa mereka akan dibiarkan (saja) mengatakan : “kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji (dievaluasi) lagi ? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. (QS. Al-Ankabut, 29:2-3).¹⁶

B. Kepala Sekolah

1. Pengertian Kepala Sekolah

Sekolah merupakan instiyusi paling depan dalam menjalankan proses pendidikan. Pendidikan secara makro pada akhirnya akan bermuara pada sekolah melalui pembelajaran. Kepala sekolah sangat berperan dalam menggerakkan berbagai komponen di sekolah sehingga proses belajar mengajar di sekolah itu berjalan dengan baik.¹⁷

Menurut Wahjosumijo kepala sekolah terdiri dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat di artikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Dengan demikian secara

¹⁶ Al Qur'an Surat Al-Ankabut ayat 2-3, Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 396.

¹⁷ Budi Suhardiman, *Studi pengembangan Kepala Sekolah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 1.

sederhana kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.¹⁸

Dari uraian di atas, maka upaya kepala sekolah dapat diartikan bahwa seorang pemimpin yang mempunyai usaha dalam pendidikan dan pengajaran yang banyak dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang beraneka ragam untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kepemimpinan kepala sekolah berperan penting dalam perkembangan sekolah. Jiwa kepemimpinan kepala sekolah dipertaruhkan dalam proses pembinaan para guru, pegawai tata usaha, dan pegawai sekolah lainnya. Sebagai pemimpin, ia harus mengetahui, memahami semua hal yang berkaitan dengan administrasi sekolah dan potensi yang dimiliki oleh para gurunya, sehingga komunikasi dengan guru dan karyawan sekolah akan membantu kinerjanya, terutama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh sekolah yang dipimpinnya.¹⁹

2. Syarat-syarat Kepala Sekolah

Seorang Kepala Sekolah hendaknya memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan kepemimpinan yang akan dipegangnya. Ia hendaknya memiliki sifat-sifat jujur, adil dan dapat dipercaya, suka menolong dan membantu guru dalam menjalankan tugas dan mengatasi kesulitan-kesulitan, bersifat supel dan ramah mempunyai sifat tegas dan konsekuen. Maka syarat seorang Kepala Sekolah menurut M. Dariyanto dalam bukunya Administrasi Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

¹⁸ Wahjo Sumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 83.

¹⁹ Tatang S, *Supervisi Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 87.

- b. Mempunyai pengalaman kerja yang cukup, terutama di sekolah yang sejenis dengan sekolah yang dipimpinnya.
- c. Mempunyai sifat kepribadian yang baik, terutama sikap dan sifat-sifat kepribadian yang diperlukan bagi kepentingan pendidikan.
- d. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, terutama mengenai bidang-bidang pengetahuan pekerjaan yang diperlukan bagi sekolah yang dipimpinnya.
- e. Mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan sekolahnya.²⁰

3. Fungsi dan Peran Kepala Sekolah

Fungsi kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya di sekolah sebagai pimpinan, seorang Kepala Sekolah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumus tujuan kerja dan pembuat kebijaksanaan sekolah.
- b. Pengatur tata kerja sekolah, yang mencakup:
 - 1) Pengatur pembagian tugas dan wewenang.
 - 2) Mengatur petugas pelaksanaan.
 - 3) Menyelenggarakan kegiatan.
- c. Supervisi kegiatan sekolah, meliputi:
 - 1) Mengawasi kelancaran kegiatan.
 - 2) Mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
 - 3) Mengevaluasi (menilai) pelaksanaan kegiatan.
 - 4) Membimbing dan meningkatkan kemampuan pelaksanaa dan sebagainya.²¹

²⁰ M. Daryanto, *Administrasi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.92.

²¹ *Ibid.*, 83.

Sedangkan Peran Kepala Sekolah dalam tingkatan sekolah, Kepala Sekolah sebagai figur kunci dalam mendorong perkembangan dan kemajuan sekolah. Kepala Sekolah tidak hanya meningkatkan tanggung jawab dan otoritasnya dalam program-program sekolah, kurikulum dan keputusan personel, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas keberhasilan siswa dan program. Menurut Nur Kholis dalam bukunya *Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model dan Aplikasi*, bahwa peran kepala sekolah memiliki banyak fungsi antara lain:

- a. Sebagai evaluator, seorang Kepala Sekolah harus melakukan langkah awal, yaitu melakukan pengukuran seperti kehadiran, kerajinan dan pribadi para guru, tenaga kependidikan, administrator sekolah dan siswa.
- b. Sebagai manajer, seorang Kepala Sekolah harus memerankan. Fungsi manajerial dengan melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, mengerakkan dan mengoordinasikan.
- c. Sebagai administrator, seorang Kepala Sekolah memiliki dua tugas utama. *Pertama*, sebagai pengendali struktur organisasi. *Kedua* melaksanakan administrasi substantif yang mencakup administrasi kurikulum, kesiswaan, personalia, keuangan, sarana, hubungan dengan masyarakat, dan administrasi umum.
- d. Sebagai supervisor, seorang Kepala Sekolah berkewajiban untuk memberikan pembinaan atau bimbingan kepada para guru dan tenaga kependidikan.

- e. Sebagai *leader*, seorang Kepala Sekolah harus mampu mengerakkan orang lain agar secara sadar dan sukarela melaksanakan kewajibannya secara baik sesuai dengan yang diharapkan pimpinan dalam rangka mencapai tujuan.
- f. Sebagai inovator, seorang Kepala Sekolah melaksanakan pembaruan-pembaruan terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah yang dipimpin berdasarkan prediksi-prediksi yang telah dilakukan sebelumnya.
- g. Sebagai motivator, maka Kepala Sekolah harus selalu memberikan motivasi kepada guru dan tenaga kependidikan.²²

Kepala Sekolah profesional tidak saja dituntut untuk melaksanakan berbagai tugas disekolah, tetapi ia juga harus mampu menjalin hubungan atau kerja sama dengan masyarakat dalam rangka membina pribadi peserta didik secara optimal.²³

C. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

1. Definisi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan, kebijakan pemerintah telah bergulir dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Yang didalamnya antara lain mengamanatkan bahwa kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan, satuan pendidikan harus mengembangkan sendiri kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan serta potensi peserta didik, masyarakat, dan lingkungannya. Kurikulum yang

²² Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model dan Aplikasi*, Grasindo, Jakarta, 2003, hlm. 119-121.

²³ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006, hlm. 187.

harus dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan disebut KTSP.

Salah satu indikator dari sekian banyak indikator yang diharapkan akan mendorong peningkatan mutu pendidikan adalah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Kriteria Ketuntasan Minimal adalah tingkat pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran oleh peserta didik per mata pelajaran.²⁴

Satuan pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin untuk melampaui KKM yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan salah satu tolak ukur kinerja satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan. Satuan pendidikan dengan KKM yang tinggi dan dilaksanakan secara tanggung jawab dapat menjadi tolak ukur kualitas mutu pendidikan bagi masyarakat.²⁵

Ketuntasan belajar dapat diartikan sebagai pendekatan dalam pembelajaran yang mempersyaratkan peserta didik dalam menguasai secara tuntas seluruh standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditetapkan. Bisa disimpulkan bahwa KKM adalah tingkat pencapaian kompetensi dasar yang harus diperoleh siswa per mata pelajaran. KKM ini harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai.

KKM ini ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama dalam penetapan KKM.

²⁴ Khaeruddin dan Mahfud Junaidi, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep dan Implementasinya di Madrasah*, Madrasah Development Center, Pilar Media, Jogjakarta, 2007, hlm. 188.

²⁵ Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, *Juknis Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)*, 2010, hlm. 4.

Sekolah atau madrasah dapat menetapkan batas atau standar ketuntasan belajar minimal dari bawah nilai ketuntasan maksimal 100 (seratus), dengan catatan sekolah atau madrasah harus merencanakan target waktu tertentu untuk mencapai nilai ketuntasan belajar ideal.

2. Fungsi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Fungsi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) diantaranya yaitu:²⁶

- a) Sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti.

Setiap kompetensi dasar dapat diketahui ketercapaiannya berdasarkan KKM yang ditetapkan. Pendidik harus memberikan respon yang tepat terhadap pencapaian kompetensi dasar dalam bentuk pemberian layanan remedial atau layanan pengayaan.

- b) Sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran.

Setiap kompetensi dasar dan indikator ditetapkan KKM yang harus dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Peserta didik diharapkan dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti penilaian agar mencapai nilai melebihi KKM. Apabila hal tersebut tidak bisa dicapai, peserta didik harus mengetahui KD-KD yang belum tuntas dan perlu perbaikan.

- c) Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah.

Evaluasi keterlaksanaan dan hasil program kurikulum dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian KKM sebagai tolak ukur. Oleh karena itu hasil pencapaian KD berdasarkan KKM yang ditetapkan perlu dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang peta KD-KD tiap mata

²⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

pelajaran yang mudah atau sulit, dan cara perbaikan dalam proses pembelajaran maupun pemenuhan sarana prasarana belajar di sekolah.²⁷

- d) Merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat.

Keberhasilan pencapaian KKM merupakan upaya yang harus dilakukan bersama antara pendidik, peserta didik, pimpinan satuan pendidikan dan orang tua. Pendidik melakukan upaya pencapaian KKM dengan memaksimalkan proses pembelajaran dan penilaian. Peserta didik melakukan upaya pencapaian KKM dengan proaktif mengikuti kegiatan pembelajaran serta mengerjakan tugas-tugas yang telah didesain pendidik. Orang tua dapat membantu dengan memberikan motivasi dan dukungan penuh bagi putra-putrinya dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan pimpinan satuan pendidikan berupaya memaksimalkan kebutuhan untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran dan penilaian di sekolah.

- e) Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran.

Satuan pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin untuk melampaui KKM yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan salah satu tolak ukur kinerja satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan. Satuan pendidikan dengan KKM yang tinggi dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dapat menjadi tolak ukur kualitas mutu pendidikan bagi masyarakat.²⁸

3. Langkah-langkah Menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas kompetensi, serta kemampuan sumber daya pendukung meliputi warga sekolah, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembelajaran. Satuan pendidikan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar minimal secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan KKM adalah sebagai berikut:

- a) Hitung jumlah Kompetensi dasar (KD) setiap mata pelajaran setiap kelas.
- b) Tentukan kekuatan/nilai untuk setiap aspek/komponen, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing aspek:
 - 1) Aspek kompleksitas.
Semakin kompleks (sukar) KD maka nilainya semakin rendah, tetapi semakin mudah KD maka nilainya semakin tinggi.
 - 2) Aspek sumber daya pendukung.
Semakin tinggi sumber daya pendukung maka nilainya semakin tinggi.
 - 3) Aspek *intake*.
Semakin tinggi kemampuan awal siswa (*intake*) maka nilainya semakin tinggi.
- c) Jumlahkan nilai setiap komponen, selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD.
- d) Jumlahkan seluruh KKM KD, selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran.
- e) KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa.²⁹

4. Rambu-rambu Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

- a) Nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0-100
- b) Nilai KKM maksimum adalah 100

²⁹ Husamah dan Yanur Setyaningrum, *Desain Pembelajaran Berbasis Pencapaian Kompetensi*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2013, hlm. 156.

- c) Madrasah dapat menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal dibawah 100, namun madrasah harus merencanakan target dalam waktu tertentu untuk mencapai nilai maksimum
- d) Nilai KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran untuk setiap mata pelajaran dan dievaluasi ketercapaiannya pada setiap semester
- e) Penetapan KKM dilakukan oleh forum guru baik yang berada dilingkungan madrasah yang bersangkutan maupun dengan madrasah/sekolah lain yang terdekat atau forum MGMP setempat
- f) Penetapan nilai KKM dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimum pada setiap Kompetensi Dasar (KD)
- g) Nilai KKM setiap KD merupakan rata-rata nilai setiap indikator
- h) Setiap KD dan IP (Indikator Pencapaian) dimungkinkan adanya perbedaan nilai KKM
- i) Nilai KKM tersebut dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar Peserta didik (LHBS/Raport) dan harus diinformasikan kepada seluruh warga madrasah dan orang tua peserta didik.³⁰

5. Kriteria Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

- a) Esensial
 - 1) Sangat esensial, karena berfungsi sebagai indikator kunci yang: bermakna dan bermanfaat untuk pencapaian kompetensi indikator/KD/SK selanjutnya (berkelanjutan), bermakna dan bermanfaat untuk pembentukan kecakapan hidup (*life skills*) siswa
 - 2) Cukup esensial, karena berfungsi sebagai indikator pendukung yang dapat melengkapi pencapaian kompetensi selanjutnya

³⁰ Khaeruddin dan Mahfud Junaidi, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep dan Implementasinya di Madrasah*, Madrasah Development Center, Pilar Media, Jogjakarta, 2007, hlm. 233.

b) Kompleksitas indikator

Yaitu kesulitan dan kerumitan setiap indikator pencapaian/kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik.

c) Daya pendukung

Yaitu tenaga, sarana, dan prasarana pendidikan, biaya, manajemen, komite madrasah dan *stakeholders* madrasah.

d) Intake peserta didik

Intake merupakan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik yang meliputi hasil seleksi Penerimaan Siswa Baru (PSB), rapor kelas terakhir dari tahun sebelumnya, tes seleksi masuk atau psikotes dan nilai ujian nasional bagi jenjang MTs dan MA.³¹

D. Aqidah Akhlak

1. Pengertian Mata Pelajaran Aqidah Akhlak

Menurut bahasa, kata aqidah berasal dari bahasa Arab yaitu (*'aqada-ya'qidu-'aqdan*) artinya adalah mengikat atau mengadakan perjanjian. Kata aqidah berakar dari kata *'aqada-ya'qidu*, yang berarti menyimpulkan atau mengikatkan tali dan mengadakan perjanjian. Dari kata ini muncul bentuk lain, seperti *I'tiqada-ya'taqidu* dan *I'tiqad*, yang berarti mempercayai, meyakini dan keyakinan.³² Menurut Hasan al-Banna Aqidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keragu-raguan.³³

Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairy, aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, fitrah, dan kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di

³¹ *Ibid.*, hlm. 236.

³² Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, Konsep, dan Implementasi Kurikulum*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hlm. 68.

³³ Buku Pedoman LKS Madrasah Aliyah, Team Kreatif : Putra Nugraha, Surakarta, 2014, hlm. 4.

dalam hati serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu.³⁴

Sedangkan aqidah menurut istilah adalah urusan-urusan yang harus dibenarkan oleh hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh keragu-raguan. Dalam definisi lain disebutkan bahwa aqidah adalah sesuatu yang mengharapakan hati membenarkannya, yang membuat jiwa tenang, tentram kepadanya dan yang menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan.³⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aqidah adalah dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat.

Sementara kata “akhlak” juga berasal dari bahasa Arab, yaitu (kholaqo) jamaknya (akhlaaq) yang artinya tingkah laku, perangai, tabiat, watak, moral atau budi pekerti.³⁶ Dalam kamus bahasa Indonesia, akhlak dapat diartikan budi pekerti, tabiat, kelakuan, watak.³⁷ Jadi, akhlak merupakan sikap yang telah melekat pada diri seseorang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Jika tindakan spontan itu baik menurut pandangan akal dan agama, maka disebut akhlak yang baik atau akhlaqul karimah, atau akhlak mahmudah. Akan tetapi apabila tindakan spontan itu berupa perbuatan yang jelek, maka disebut akhlak tercela atau akhlaqul madzmumah.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Aqidah adalah suatu keyakinan yang dikaitkan dengan rukun iman dan merupakan asas dari seluruh ajaran Islam. Menurut Al Ghazali dalam bukunya “Ihya

³⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Imam Al Ghazali, *Ihya Iliumal-Din Juz III*, Darul Kutubul Ilmiah, Beirut, tt., hlm. 56.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm.

Ulumuddin”, menjelaskan bahwa akhlak berarti sifat yang tertanam di dalam jiwa yang darinya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Akhlak adalah pembentukan kepribadian seseorang untuk berakhlak mulia sebagai wujud manifestasi aqidahnya dalam perilaku sehari-hari berupa ucapan, sikap, dan perbuatan tanpa pertimbangan. Aqidah Akhlak merupakan bagian dari mata pelajaran PAI di madrasah yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan yang diwujudkan dalam Akhlaknya yang terpuji sehingga manusia muslim yang terus berkembang dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta berakhlak mulia.³⁸

2. Fungsi, Tujuan, dan Ruang Lingkup Mata Pelajaran Aqidah Akhlak

a) Fungsi dari mata pelajaran Aqidah Akhlak adalah sebagai berikut :

- 1) Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- 2) Pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, yang sebelumnya telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga.
- 3) Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial.
- 4) Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya asing yang dihadapinya sehari-hari.
- 5) Pembekalan bagi peserta didik untuk mendalami Aqidah dan Akhlak pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

b) Tujuan Mata Pelajaran Aqidah Akhlak

³⁸ *Ibid*, hlm. 36.

Mata pelajaran Aqidah Akhlak bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam Akhlaknya yang terpuji, melalui pemberian pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang Aqidah dan Akhlak Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang, meningkat kualitas keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.³⁹

Mata pelajaran Aqidah Akhlak berisi bahan pelajaran yang dapat mengarahkan pada pencapaian kemampuan dasarpeserta didik untuk dapat memahami rukun iman secara ilmiahserta pengamalan dan pembiasaan berakhlak Islami, untukdapat dijadikan landasan perilaku dalam kehidupan sehari-hari serta sebagai bekal untuk jenjang pendidikan berikutnya.

c) Ruang Lingkup Mata Pelajaran Aqidah Akhlak

Mata pelajaran Aqidah Akhlak mencakup beberapa ruang lingkup diantaranya :

1) Aspek Aqidah

Aspek aqidah ini meliputi: kebenaran Aqidah Islam, hubungan aqidah dan Akhlak, keesaan Allah, kekuasaan Allah, Allah Maha Pemberi Rizki, Maha Pengasih Penyayang, Maha Pengampun, Maha Adil, dengan argumen dalil, meyakini bahwa Muhammad adalah Rasul terakhir, meyakini kebenaran al qur'an dengan dalil, dan meyakini qada' dan qadar.

2) Aspek Akhlak

³⁹ Departemen Agama RI, *Kurikulum Madrasah Aliyah: Standar Kompetensi*, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2004, hlm. 22.

Aspek Akhlak yang meliputi: beradab secara Islam dalam bermusyawarah untuk membangun demokrasi, berakhlak terpuji untuk memperkokoh integritas dan kredibilitas pribadi, dan memperkokoh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3) Aspek Kisah Keteladanan

Aspek kisah keteladanan yang meliputi: mengapresiasi dan meneladani sifat dan perilaku sahabat utama Rasulullah SAW dengan landasan argumen yang kuat. Di sini dapat disimpulkan bahwa dalam ruang lingkup Aqidah Akhlak, terdapat tiga hal pokok didalamnya yaitu aspek Aqidah, Akhlak dan kisah keteladanan. Ketiga hal tersebut dijadikan sumber materi guna membentuk akhlakul karimah pada diri peserta didik.⁴⁰

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dari penulis dan mendiskripsikan beberapa penelitian maupun literatur lain yang isinya relevan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Tetapi penekanannya lebih ditekankan sebagai pembanding agar penelitian ini bukan penelitian duplikasi maupun replikasi dari penelitian yang sudah ada terhadap pustaka yang telah ditelaah.

Pertama: Afrilia Rustanti, dengan judul *“Studi Analisis tentang Pelaksanaan Evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di MTs Mafatihul Islamiyah Japan Dawe Kudus tahun ajaran 2010/2011”* bahwa, pelaksanaan evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada pembelajaran Aqidah Akhlak di MTS Mafatihul Islamiyah Japan Dawe Kudus tahun ajaran 2010/2011 tergolong baik. Disamping itu, prestasi atau nilai rata-rata siswa untuk Aqidah Akhlak mencapai 7,5. Dengan

⁴⁰ Ibid, hlm. 25.

demikian, guru Aqidah Akhlak sudah dianggap melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk memajukan prestasi peserta didik.⁴¹

Kedua: Sudarman, dengan judul *“Problematika Pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran PAI (Studi pada Proses Belajar Mengajar PAI di SD 1 Menawan Gebog Kudus)”* bahwa, problematika pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran PAI adalah minat belajar siswa yang rendah, bahkan bisa dikatakan minat belajar siswa kurang, hal ini dikarenakan banyaknya pengaruh dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal dari dalam pembelajaran dikelas atau disekolahan yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga siswa enggan untuk belajar, jenuhnya pembelajaran siswa dikarenakan pembelajaran terus-menerus di kelas tidak ada inovasi pembelajaran yang menarik, metode pembelajaran yang selalu monoton, guru sebagai moderator atau penceramah dan kurangnya siswa diberikan kesempatan untuk bersifat kreatif dalam memahami pelajaran PAI. Dari faktor eksternal diantaranya kurangnya perhatian orang tua sehingga peserta didik tidak bisa mengatur waktu belajar dan waktu banyak digunakan untuk bermain dari pada belajar.⁴²

Ketiga: M. Fajrin Nadhief, dengan judul *“Evaluasi Model Illuminative pada Pembelajaran Al Qur’an Hadits di Kelas Unggulan Mts NU Banat Kudus tahun 2013/2014”* bahwa, sistem evaluasi model illuminative yang dilaksanakan Madrasah Tsanawiyah (MTs) NU Banat Kudus pada pembelajaran Al Qur’an Hadits menganut prinsip keseimbangan dalam kurikulum. MTs NU Banat Kudus mempunyai visi, misi, dan tujuan pokok ingin anak didik mencapai kebahagiaan duniawi dan sekaligus ukhrowinya kelak. Oleh karenanya, MTs NU Banat Kudus secara jelas menciri khasanah pendidikannya dengan pendidikan Islam yaitu sifat

⁴¹ Afrilia Rustanti, *Studi Analisis tentang Pelaksanaan Evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di MTs Mafatihul Islamiyah Japan Dawe Kudus tahun ajaran 2010/2011*, Skripsi, Tarbiyah/PAI, STAIN Kudus, tahun 2011.

⁴² Sudarman, *Problematika Pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran PAI (Studi pada Proses Belajar Mengajar PAI di SD 1 Menawan Gebog Kudus)*, Skripsi, Tarbiyah/PAI, STAIN Kudus, tahun 2013.

moral religius, dengan tanpa mengabaikan masalah-masalah duniawi. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa sistem evaluasi illuminative dalam pembelajaran Al Qur'an Hadits di MTs NU Banat Kudus dapat dipandang sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam yakni evaluasi yang bernafaskan agama dan moral.⁴³

Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, sebagaimana penulis paparkan di atas, berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji dalam skripsi ini. Akan tetapi, secara tidak langsung penelitian sebelumnya masih ada kaitannya dengan skripsi ini. Seperti skripsi Afrilia Rustianti fokusnya pada pelaksanaan evaluasi KTSP, skripsi Sudarman fokusnya pada problematika pencapaian KKM, dan skripsi M. Fajrin Nadhief fokusnya pada evaluasi model illuminative. Dari situ penulis bisa menyimpulkan bahwa, skripsi sebelumnya ada yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi dan ada yang berkaitan dengan KKM. Sedangkan dalam skripsi penulis adalah merupakan pelaksanaan program evaluasi meta untuk meningkatkan pencapaian standar KKM di MTs Miftahul Huda Bulung Kulon Jekulo Kudus.

Berikut adalah tabel perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis:

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Kesimpulan
1	Afrilia Rustanti	<i>Pelaksanaan Evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di MTs</i>	Kualitatif	pelaksanaan evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada pembelajaran Aqidah Akhlak di MTS	Fokusnya pada evaluasi KTSP sedangkan penulis pada

⁴³ M. Fajrin Nadhief, *Evaluasi Model Illuminative pada Pembelajaran Al Qur'an Hadits di Kelas Unggulan Mts NU Banat Kudus tahun 2013/2014*, Skripsi, Tarbiyah/PAI, STAIN Kudus, tahun 2014.

		<i>Mafatihul Islamiyah Japan Dawe Kudus tahun ajaran 2010/2011</i>		Mafatihul Islamiyah Japan Dawe Kudus tahun ajaran 2010/2011 tergolong baik.	evaluasi meta
2	Sudarman	<i>Problematika Pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran PAI (Studi pada Proses Belajar Mengajar PAI di SD 1 Menawan Gebog Kudus)</i>	Kualitatif	problematika pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran PAI adalah minat belajar siswa yang rendah, bahkan bisa dikatakan minat belajar siswa kurang.	Fokusnya pada problem pencapaian KKM sedangkan penulis membahas peningkatan KKM
3	M. Fajrin Nadhief	<i>Evaluasi Model Illuminative pada Pembelajaran Al Qur'an Hadits di Kelas Unggulan Mts NU Banat Kudus tahun 2013/2014</i>	Kualitatif	sistem evaluasi model illuminative yang dilaksanakan Madrasah Tsanawiyah (MTs) NU Banat Kudus pada pembelajaran Al Qur'an Hadits menganut prinsip keseimbangan dalam kurikulum.	Fokusnya pada evaluasi illuminative sedangkan penulis pada evaluasi meta

F. Kerangka Berpikir

Tolak ukur hasil pendidikan dapat diketahui dengan adanya evaluasi, begitu juga dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Setiap evaluasi sedikit banyak mengandung bias dari keputusan yang diambil evaluator tentang apa yang akan diuji, instrument apa yang dipakai, semua itu mempengaruhi hasil evaluasi, dan tentunya akan berdampak pada pencapaian nilai siswa. Oleh sebab itu evaluasi meta atau mengevaluasi evaluasi penting adanya. Dengan adanya pelaksanaan evaluasi meta pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Mts Miftahul huda, diharapkan dapat meningkatkan pencapaian standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

Melihat gambaran di atas, maka bentuk kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

